

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Dimasa pergantian era reformasi pembangunan manusia merupakan hal pokok yang harus dilakukan oleh pemerintah di Indonesia, bahkan tidak hanya di Indonesia di negara-negara lainpun mempunyai kebijakan tersendiri dalam pembangunan manusia,hal ini karena pembangunan manusia menjadi prioritas peran pemerintah untuk menuju negara yang maju dalam segala aspek terutama pada sumber daya manusia. Dengan di terapkannya sistem otonomi daerah sejak 1 januari 2001 diseluruh Dati II (Kota dan Kabupaten) membuat pemerintah mengubah sistem pemerintahan menjadi desentralisasi.

Desentralisasi fiskal akan menjadi peluang besar bagi pemerintah daerah terutama dalam bidang ekonomi maupun dari sisi perencanaan, pembangunan serta pembiayaan agar terwujud kemakmuran dan kesejahteraan. Sebab tolak ukur keberhasilan desentralisasi dalam pembangunan dilihat dari pertumbuhan ekonomi.Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) bentuk-bentuk desentralisasi dalam era otonomi daerah meliputi; desentralisasi pelayanan masyarakat, desentralisasi administratif, desentralisasi fiskal, dan desentralisasi politik.

Oleh karena itu daerah yang mampu untuk menggali potensinya akan memperoleh keuntungan bagi daerahnya sendiri terutama dari segi

pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah selain dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. PAD yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (UU No. 33/2004). Kuncoro (2007) juga menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemda paling tinggi sebesar 20%. Kemandirian bagi daerah belum sepenuhnya terlaksana karena mereka masih menggantungkan adanya dana dari pemerintah pusat, khususnya DAU.

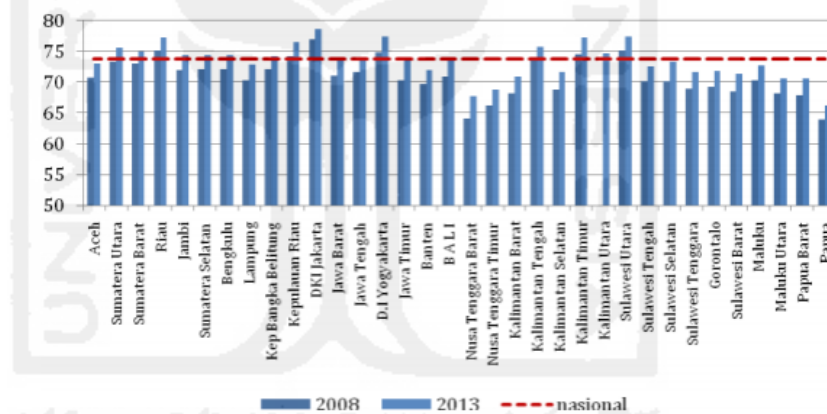
Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia, pemerintah daerah seharusnya bisa mengalokasikan atau mempersikan belanja daerahnya untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas publik. Menurut Ginting (2008) yang menyatakan bahwa sudah saatnya pembangunan tidak lagi diletakkan pada kekuatan sumber daya alam (*natural resources based*), tetapi pada kekuatan sumber daya manusia (*human resource based*). Caranya adalah dengan meletakkan prioritas pembangunan pada pembangunan manusia, karena pada akhirnya pembangunan manusia yang berhasil akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia maka setiap daerah akan mampu mengurangi kesenjangan sosial, dengan menyediakan barang dan jasa publik yang lebih baik dan efisien serta dapat mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Berdasarkan Christy dan Aldi (2009) yang menggunakan IPM untuk mengklarifikasi apakah suatu negara adalah

negara adalah negara maju. Negara berkembang atau negara terbelakang dan juga mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Jadi pembangunan harus memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, baik menyangkut pemenuhan kebutuhan fisik maupun non fisik. Maka IPM sebagai indeks komposit digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk hidup secara lebih berkualitas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun aspek ekonomi.

Gambar 1.1

Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013



Sumber: BPS, 2013

IPM Jawa Tengah berada pada peringkat 16 secara nasional dengan nilai IPM sebesar 74,05 pada tahun 2013. Pada indikator usia harapan hidup, terjadi sedikit perbaikan dari 71,1 tahun pada tahun 2008 menjadi 71,97 tahun pada tahun 2013. Rata - rata lama sekolah di Jawa Tengah meningkat dari 6,86 tahun pada 2008 menjadi 7,43 tahun pada 2013. Sementara itu pada indikator angka melek huruf, capaian di Jawa

Tengah pada tahun 2008 dan 2013 meningkat dari 89,24 menjadi 91,71 persen, lebih rendah dari capaian nasional 94,14 persen.

Table 1.1

Tingkat IPM Kabupaten/Kota Jawa Tengah di 5 (lima) tahun terakhir Tahun 2009 - 2013

NO	Kabupaten/kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kab. Cilacap	71.39	71.73	72.34	72.77	73.34
2	Kab. Banyumas	72.27	72.60	72.96	73.33	73.96
3	Kab. Purbalingga	71.51	72.07	72.50	72.97	73.49
4	Kab. Banjarnegara	69.63	69.91	70.39	70.70	71.13
5	Kab. Kebumen	70.73	71.12	71.62	71.86	72.25
6	Kab. Purworejo	71.88	72.55	72.91	73.53	74.18
7	Kab. Wonosobo	70.08	70.52	71.06	71.45	71.90
8	Kab. Magelang	71.76	72.08	72.69	73.14	73.67
9	Kab. Boyolali	70.44	70.72	71.25	71.50	71.88
10	Kab. Klaten	73.41	73.83	74.10	74.46	74.91
11	Kab. Sukoharjo	73.29	73.57	73.97	74.21	74.91
12	Kab. Wonogiri	71.04	71.33	71.86	72.59	73.09
13	Kab. Karanganyar	72.55	73.19	73.82	74.62	75.27
14	Kab. Sragen	70.27	71.00	71.33	71.85	72.31
15	Kab. Grobogan	70.60	70.83	71.27	71.77	72.37
16	Kab. Blora	70.14	70.61	71.25	71.49	72.10
17	Kab. Rembang	71.55	72.07	72.45	72.81	73.53
18	Kab. Pati	72.72	72.96	73.48	73.81	74.58
19	Kab. Kudus	72.57	72.95	73.24	73.69	74.09
20	Kab. Jepara	72.45	72.64	73.12	73.54	74.13
21	Kab. Demak	72.10	72.58	73.09	73.52	73.85
22	Kab. Semarang	73.66	74.10	74.45	74.98	75.48
23	Kab. Temanggung	73.85	74.11	74.47	74.74	75.00
24	Kab. Kendal	70.07	70.41	70.85	71.48	72.03
25	Kab. Batang	69.84	70.41	71.06	71.41	72.03
26	Kab. Pekalongan	70.83	71.40	71.86	72.37	73.14
27	Kab. Pemalang	69.02	69.89	70.22	70.66	71.26

28	Kab. Tegal	70.08	70.59	71.09	71.74	72.22
29	Kab. Brebes	67.69	68.20	68.61	69.37	69.85
30	Kota Magelang	76.37	76.60	76.83	77.26	77.91
31	Kota Surakarta	77.49	77.86	78.18	78.60	79.10
32	Kota Salatiga	76.11	76.53	76.83	77.13	77.54
33	Kota Semarang	76.90	77.11	77.42	77.98	78.54
34	Kota Pekalongan	74.01	74.47	74.90	75.25	75.75
35	Kota Tegal	73.63	73.89	74.20	74.63	75.02

Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan table 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat indeks pembangunan manusia di 35 kabupaten/kota provinsi jawa tengah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara absolut dari tahun 2009 hingga 2013, hal ini bisa dilihat bahwa terdapat peningkatan pembangunan yang efektif dalam menerapkan desentralisasi melalui kemandirian keuangan daerah, harapannya daerah akan lebih mampu untuk meningkatkan pelayanan serta menyediakan fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah daerah, begitu juga dengan adanya faktor penunjang pelayanan publik dan fasilitas dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Sehingga pemerintah daerah dapat semakin terus menerus memperbaiki pembangunan manusia melalui IPM

Secara umum IPM merupakan capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah dasar komponen kualitas hidup melalui tiga dimensi mencakup umur yang panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Peningkatan IPM menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi semakin membaik seiring dengan meningkatnya Produk Domestik Regionall Bruto (PDRB).Peningkatan PDRB menjelaskan bahwa

pendapatan masyarakat meningkat sehingga bisa mengidentifikasi bahwa kesejahteraan masyarakat juga akan lebih baik.

Grafik 1.2

Perkembangan Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah.

Berdasarkan hasil penghitungan PDRB tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012, PDRB Jawa Tengah atas dasar harga konstan dan harga berlaku terjadi peningkatan sebesar Rp 12,30 triliun dan Rp 67,3 triliun. Dalam kurun waktu 2010-2013, laju pertumbuhan PDRB Jawa Tengah menurut harga konstan relatif stabil dengan pertumbuhan yang bervariasi disekitar 5,8% - 6,3%, sedangkan menurut harga berlaku bergerak disekitar 11,56%-12,17%. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) atas dasar harga konstan 2000, lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu 5,83 persen (tahun 2012 = 6,30 persen).

Grafik 1.3

Proporsi Alokasi Pendapatan APBD

Tahun 2009 s.d. 2013(persen)



Sumber : DJPK (2009-2012), Pemerintah Daerah (2013), diolah

Proporsi PAD tahun 2009 s.d. 2013 yang masih di bawah 25% menunjukkan bahwa APBD pemerintah daerah di Jawa Tengah masih sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, peningkatan proporsi alokasi PAD dan penurunan proporsi alokasi Dana Perimbangan dari tahun 2009 sampai dengan 2013 merupakan sinyal positif terhadap usaha pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Pada APBD tahun 2013, alokasi PAD terbesar adalah pemerintah provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp.7.413,08 milyar diikuti Kota Semarang Rp.778,86 milyar dan Kota Surakarta Rp.280,17 milyar. Sedangkan apabila dilihat dari proporsi alokasi PAD terhadap total

pendapatan, proporsi terbesar adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 58,5%, Kota Semarang 30%, dan Kota Tegal 22,9%. Pemerintah Daerah dengan alokasi PAD terbesar dapat dilihat pada tabel

Tabe 1.1
Pemerintah Daerah dengan Alokasi PAD Terbesar
APBD Tahun 2013

No.	PEMERINTAH DAERAH	PAD (Juta Rupiah)	No.	PEMERINTAH DAERAH	PAD/TOTAL PENDAPATAN (%)
1	Prov. Jawa Tengah	7.413.087	1	Prov. Jawa Tengah	58,5%
2	Kota Semarang	778.867	2	Kota Semarang	30,0%
3	Kota Surakarta	280.170	3	Kota Tegal	22,9%
4	Kab. Banyumas	269.887	4	Kota Surakarta	20,4%
5	Kab. Cilacap	242.418	5	Kota Magelang	15,3%
6	Kab. Semarang	202.417	6	Kab. Semarang	14,6%
7	Kab. Sukoharjo	170.463	7	Kota Salatiga	14,6%
8	Kota Tegal	160.596	8	Kota Pekalongan	14,4%
9	Kab. Boyolali	160.268	9	Kab. Banyumas	13,6%
10	Kab. Pati	146.252	10	Kab. Sukoharjo	12,7%

Sumber : Pemerintah Daerah, 2013

Grafik 4.1
Perbandingan Pagu dan Realisasi Dana Transfer
Tahun 2009 -2013 (juta rupiah)



Sumber Data : DJPK (pagu 2008-2012, realisasi 2008- 2011) , Pemprov Jateng, Pemkab/Pemkot di Jawa Tengah (Pagu2013 dan realisasi 2012-2013),diolah

1. Dana Alokasi Umum

Alokasi DAU menunjukkan jumlah yang terus meningkat dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Peningkatan tersebut berkisar antara 1,23% hingga 22,98%. Kenaikan tertinggi terjadi di tahun 2012 dari sebelumnya hanya sebesar Rp. 21.525,35 milyar menjadi sebesar Rp. 26.471,05 milyar. Sedangkan kenaikan terendah terjadi di tahun 2010 dari sebelumnya sebesar Rp. 19.237,32 milyar menjadi sebesar Rp. 19.473,87 milyar. Pada tahun 2013 alokasi DAU meningkat 11,07% menjadi Rp.29.401,94 milyar.

2. Dana Alokasi Khusus

Alokasi DAK menunjukkan kenaikan dan penurunan yang bervariasi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Sesuai grafik diatas, alokasi DAK mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2009, tahun 2011 dan tahun 2013. Sedangkan di tahun 2010 dan tahun 2013 alokasi DAK menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan diatas secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mempunyai tingkat IPM yang relative tinggi dan disokong oleh meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto, begitu juga dengan keuangan daerah yang merupakan pendapatan serta transfer dari pemerintah pusat mengalami peningkatan dan penurunan. Sehingga dapat digambarkan bahwa di kabupaten/kota provinsi jawa tengah mengalami perbedaan dalam keuangan daerahnya. Dengan begitu bisa di proyeksikan bahwa setiap daerah masih mengalami minimnya fasilitas publik untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator terhadap pemabangunan ekonomi, hal ini karena didalam IPM terdapat komponen angka harapan hidup, tingkat pengetahuan pendidikan, dan kehidupan yang layak sehingga berkontribusi terhadap arah pembangunan manusia khususnya di kabupaten/kota di provinsi jawa tengah. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya teknologi

maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Jawa Tengah meliputi PDRB, PAD, DAU, DAK. Sehingga nantinya melalui penelitian ini pemerintah dapat mencanangkan strategi baru untuk menata dan mempersiapkan pembangunan yang lebih baik.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Bedasarkan latar belakang diatas, untuk memudahkan dan membuat pembahasan menjadi sistematis maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten /Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 – 2013 ?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten /Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 – 2013 ?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan manusia di Kabupaten /Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 – 2013 ?
4. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusiapada Kabupaten /Kota Kabupaten /Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 – 2013 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara individual maupun simultan :

1. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten /kota Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten /kota Provinsi Jawa Tengah.
3. Mendapatkan bukti empiris pengaruh dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara umum dalam penelitian ini menggunakan analisis kebijakan fiskal melalui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sehingga akan lebih untuk memahami strategi yang mempengaruhi perekonomian daerah. Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya:

a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengintegrasikan penelitiannya, sehingga bermanfaat bagi peneliti untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan keilmuannya dan akan bermanfaat untuk penelitian yang akan datang.

b. Bagi Pemerinta daerah

Penulis berharap dari adanya penelitian ini pemerintah daerah dapat memaksimalkan penerimaan, pengeluarannya serta pengelolaanya secara efektif dan efesien, sehingga dalam pengalokasiaanya lebih meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah.

